

Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia

Saifullah Isri

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: saiful.isri@gmail.com

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.25-47

Diterima: 17 Februari 2015

Direvisi: 8 Mei 2015

Disetujui: 9 Juni 2015

Abstract

Education is always influenced by factors that enveloped it. So it is very likely to occur differences in product and quality of education between one institution and another institution or between one country to another. This difference initiate researcher to be open-minded and examine the system and education implementation in an institution or another country in order to absorb positive information for improvement and advancement of education. This encourages the emergence of comparative education studies. Indonesia, in an effort to increase the quality of its education, needs to conduct a similar study by examining and comparing Indonesian education with other countries, in this case, Germany and Australia that their quality of education is among the best in the World.

Keywords: *Comparative Education, Germany, Australia, the Quality of Education*

Abstrak

Pendidikan selalu dipengaruhi faktor-faktor yang meliputinya. Sehingga sangat mungkin sekali terjadi perbedaan hasil dan kualitas pendidikan satu lembaga dengan lembaga yang lain atau satu negara dengan negara yang lain. Perbedaan inilah yang mendorong peneliti untuk terbuka dan mengkaji sistem dan implementasi pendidikan di institusi atau negara lain guna menyerap informasi positif guna perbaikan dan kemajuan pendidikan. Inilah yang mendorong munculnya kajian pendidikan komparatif. Indonesia yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya perlu melakukan kajian yang sama dengan mempelajari dan mengkomparasikan

pendidikan Indonesia dengan negara lain yang dalam hal ini adalah Jerman dan Australia yang kualitas pendidikannya termasuk yang terbaik di dunia.

Kata Kunci: *Perbandingan Pendidikan, Jerman, Australia, Mutu Pendidikan*

Pendahuluan

Keyakinan akan urgensi pendidikan telah mengantarkan peradaban manusia kepada pembentukan sistem pendidikan, yang dipandang sebagai satu hal yang wajib ada dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penyesuaian terhadap keunikan setiap komunitas yang umumnya terkait dengan nilai, ritual, teladan dan simbol.¹ Namun perbedaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat diberbagai belahan dunia, serta situasi politik menyebabkan perbedaan hasil yang dicapai. Akibatnya, studi tentang program pendidikan dan badan-badannya yang digunakan masyarakat dalam rangka memenuhi aspirasi tingginya, kian menjadi tujuan sorotan ilmiah di banyak tempat. Barangkali hasrat untuk mengetahui sebanyak-banyaknya tentang semua aktivitas kependidikan di semua tempat inilah yang menjadi ciri terbaik dari studi pendidikan komparatif di masa sekarang.

Studi komparatif dimulai di Barat dalam situasi yang pada dasarnya sama sekali berlainan. Selama berabad-abad, Gereja Katolik Roma mengklaim hak eksklusif (Baca: Monopoli) Penyelenggrakan sekolah. Namun setelah reformasi, monopoli gereja dalam pendidikan tak lagi diperkenalkan. Negara-negara merdeka yang bermunculan akibat kekalutan perang agama banyak yang memeluk agama protestan. Beberapa negara, khususnya Jerman memelopori pengembangan sistem pendidikan nasional yang hasilnya sangat memuaskan sehingga terus berkembang dan diikuti oleh negara-negara lain seperti Australia dan lain sebagainya.²

Studi perbandingan ini pada dasarnya diharapkan dapat mengembangkan sumber daya pribadi intelektual dengan melengkapinya dengan informasi tentang aspirasi, gagasan dan pengalaman orang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong para penggiat pendidikan untuk meninggalkan pola pandang sempit dalam mengembangkan sistem pendidikan. Pendidikan tidak lagi dilihat melalui kaca mata kuda, dimana para pengambil kebijakan di bidang pendidikan hanya terfokus pada sistem pendidikan sendiri. Semakin berkembang kesadaran bahwa pola pandang egosentris hanya akan menjadikan sistem pendidikan sebuah bangsa rentan terhadap resiko stagnasi pendidikan yang akan menyebabkan perkembangan ke arah yang lebih baik menjadi terhambat akibat tidak adanya upaya

¹ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung: Lubuk Agung, 2001), hlm. 9

² Don Adams, *Educational Pattern In Contemporary Societies*, In. Thut (Eds.), *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2

benchmarking dengan sistem pendidikan yang dikembangkan pihak lain. Tanpa ada bandingan, kerap seseorang terjebak dalam pola pandang “baik sendiri”.

Oleh karena itu, dalam makalah ini kami mencoba membahas dan menguraikan bagaimana konsep pendidikan Jerman dan Australia serta pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia dalam peningkatan mutu dan kualitas. Mengingat ada beberapa faktor penting dalam mengkaji studi perbandingan pendidikan khususnya untuk mahasiswa, baik dalam perspektif sosial, religius, politik, ekonomi, bahkan letak geografis.³

Negara Jerman dan Australia dipilih karena keunggulan yang dimiliki dalam sistem pendidikannya. Saat ini, Jerman dan Australia merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tahun 1970 sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan, “hanya” sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan dalam Perang Dunia II (Institut für Auslandsbeziehungen: 1986). Berbagai keunggulan Jerman dan Australia di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia II.

Sistem Pendidikan di Jerman

Secara geografis, Jerman terletak di tengah-tengah benua Eropa dengan luas daerah 356,957 km². Jerman berpenduduk 82 juta lebih, dan kira-kira 8% di antaranya adalah bukan berkebangsaan Jerman. Warga negara asing ini hijrah ke Jerman sekitar akhir tahun 1950-an, yang mayoritasnya adalah orang Turki.

Jerman pada masa Perang Dunia II merupakan negara yang kalah perang. Kondisi inilah yang mempengaruhi mental rakyatnya untuk melahirkan pemimpin/ anak negeri yang mampu membawa mereka menuju kejayaan dan hidup bermartabat.

Politik dan Tujuan Pendidikan

Dengan sejarah kelam yang bertumpu pada pengalaman kekalahan dalam dua perang dunia dan hancurnya negara Jerman, masyarakat Jerman mulai membangun sistem pendidikan yang terbebas dari potensi membuat kesalahan

³ Adapun faktor-faktor tersebut adalah; (1) Rasa persatuan nasional, (2) Situasi umum perekonomian, (3) Kepercayaan dan tradisi utama, termasuk peninggalan religius dan budaya, (4) Status pemikiran pendidikan progresif, (5) Persoalan bahasa, (6) Latar belakang politik: komunisme dan demokrasi, (7) Sikap terhadap kerja sama dan pemahaman internasional. Lihat; John Francis Cramer dan George Stephenson Browne, *Contemporary Education*, (New York: Harcourt Brace, 1956), hlm. 5

serupa, yaitu dengan memisahkan kekuasaan, termasuk dalam bidang pendidikan, agar tidak tertumpu pada satu lembaga atau satu orang saja. Hal ini dilakukan karena memandang pengaruh absolut Hitler yang membuat seluruh Jerman bergerak ke arah kehancuran.⁴ Pendidikan diarahkan kepada penanaman kemauan yang kuat untuk bangkit dan keahlian yang dibutuhkan untuk kembali berdiri sebagai negara yang kokoh dan mandiri. Di samping itu, terpecahnya Jerman menjadi dua bagian untuk waktu yang lama menjadikan isu persatuan sebagai salah satu isu penting dalam budaya pendidikan Jerman.

Pada mulanya, pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama (gereja). Selain itu, negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Sejak dikumandangkannya wajib belajar pada abad ke-17, masalah pendidikan lambat laun mulai beralih menjadi kewajiban negara.⁵

Undang-undang dasar menjamin hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan kepribadiannya dan memilih sekolah, pendidikan kejuruan dan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Berdasarkan tata negara federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi federasi dan negara bagian. Negara bagian terutama bertanggung jawab untuk sekolah umum dan sekolah kejuruan serta taman kanak-kanak.

Struktur dan Jenis Pendidikan: Pendidikan Dasar, Menengah serta Pendidikan Tinggi

Pendidikan di Jerman di mulai dari tahap pra sekolah yang disebut *Kindergarten* (Taman Kanak-Kanak) dimulai dari umur 3-6 Tahun. Pendidikan ini dinamakan "*Vorschulische Einrichtungen*", yang berarti "Persiapan sebelum Pendidikan". Konsep taman kanak-kanak di Jerman banyak ditiru oleh negara lain. Oleh sebab itulah, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermannya "*Kindergarten*". Penyelenggara taman kanak-kanak paling banyak adalah gereja-gereja, organisasi sosial dan komune, kadang-kadang juga perusahaan dan perkumpulan.⁶

Setelah *Kindergarten* dimulai pendidikan dasar pada usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Pendidikan ini dinamakan "*Grundschule*", yang berarti "Sekolah

⁴ Robert F. Lawson, *Reconstruction Education: East German School and Universities after Unification* by Rosalin M. O Princhard, (Book Review), In Comparative Education Review, Vol. 44 No. 1, Februari, 2000

⁵ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan...* hlm. 156

⁶ J. T. Fey, *System of Education of Federal Republic of Germany*. In F. Husen and Postlethwaite (Eds), *International Encyclopedia of Education*. (New York: Pergamon Press, 1985), hlm. 125

Dasar". Dari *Grundschule*, seseorang mempunyai 4 pilihan untuk melanjutkan sekolah. Pilihan tersebut :1. *Hauptschule* (kelas 5 – 9/10); 2. *Realschule* (kelas 5 – 10); 3. *Gesamtschule* (kelas 5 – 13); 4. *Gymnasium* (kelas 5 – 13).⁷

Untuk memasuki *Hauptschule*, *Realschule* atau *Gymnasium*, seseorang harus melalui “*Orientierungsstufe*” (Tahapan Orientasi). Di tahap ini diteliti bakat dan kemampuan dari anak, dan tahap ini menentukan kemana tujuan seorang anak selanjutnya. *Hauptschule* dan *Realschule* lebih ditekankan kepada anak yang ingin langsung kerja bila telah menyelesaikan sekolah. Tentu saja setelah melalui pendidikan di “*Berufsfachschule*” atau “*Fachoberschule*”. Bagi yang ingin melanjutkan ke Universitas, jalan tercepat adalah melalui *Gymnasium*. Jalan pendidikan lain juga dapat mengikuti kuliah di universitas, tapi dengan melalui jalan yang panjang. Misal harus melakukan praktek kerja dahulu selama sekian tahun.

Titel yang didapat dari Universitas di Jerman dan Indonesia hampir mirip, namun walaupun namanya sama berbeda tingkatannya. Diplom lulusan Jerman setara dengan S2 atau Master di Indonesia, dan dapat langsung mengikuti program Doktoran (Ph. D). Hal ini berarti S1 di Indonesia, pada dasarnya setara dengan *Vordiplom* di Jerman, tetapi hal ini tergantung dari *Anerkennung der Studienleistungen* (Penyamaan derajat Ijasah). Dengan demikian, bila seorang sarjana S1 lulusan Indonesia akan melanjutkan kuliah di Jerman, ada 3 kemungkinan studi yang akan ia jalani, yaitu: 1. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap setara dengan *Vordiplom* (semester 5). Untuk mendapatkan Diplom, ia harus mengikuti semua mata kuliah dari semester 5 sampai dengan pembuatan *Diplomarbeit* (Penulisan Akhir untuk mendapatkan gelar Diplom); 2. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap melebihi dari semester 5. Untuk mendapatkan Diplom, ia hanya diminta untuk mengikuti beberapa ujian untuk penyamaan derajat; 3. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap sudah mencukupi untuk dapat langsung mengikuti program Doktoran. Berdasarkan hal tersebut, maka lulusan S1 dari Indonesia kalau mau melanjutkan sekolah ke Jerman, mempunyai kemungkinan untuk langsung promosi (S3). Biasanya kalau bidang studi dan kurikulum dari S1 ke promosi (S3) tidak menyimpang jauh, akan mendapat kemudahan pada saat *Anerkennung*.⁸

Di Jerman dikenal ada dua jenis pendidikan tinggi utama yaitu *Fachhochschule* dan *Universität*. *Fachhochschule* yang sering disebut juga FH ini mirip seperti

⁷ Frackman, dkk, *Higher Education policy in Germany: In Goedegebuure, Leo et al (Eds), Higher Education Policy: An International Comparative Perspective*, (Paris: Pergamon Press, 1993), hlm. 182

⁸ U. Teichler and B. Kehm, *System of Higher Education of Federal Republic of Germany*. In Clarke, B. R., and Neave, G. (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1992), hlm. 89

politeknik di Indonesia, yaitu lembaga pendidikan yang menekankan pada bidang aplikasi. Bidang teori lebih sedikit dibandingkan dengan praktek atau aplikasinya. Studi di *Fachhochschule* tak dapat mencapai gelar doktor dan pendidikan di sini ditujukan bagi mereka yang ingin terjun ke industri langsung. Jenis pendidikan tinggi lainnya adalah *Musikhochschule* (untuk bidang musik), *Pedagogische Hochschule* (untuk bidang pendidikan, mirip IKIP dahulu) dan *Kunsthochschule* (untuk bidang seni). Sistem *Universität* (Universitas) di Jerman, berbeda dengan di Indonesia, tidak ada “panduan” ketat per semesternya, dan urutan mata kuliah A, B, C, dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dituntut harus dapat menentukan sendiri, kuliah, latihan, seminar, ujian yang akan diikutinya, dan lain sebagainya. Hal ini secara langsung memberikan “kebebasan yang sangat besar”, tapi bisa juga menjerumuskan mahasiswa ke kondisi kelewat santai (banyak beberapa mahasiswa Indonesia yang terjebak ke situasi ini, dimana sudah 8 tahun tapi belum ujian apa-apa, karena keasikan kerja atau kesibukan lainnya). Mahasiswa benar-benar dituntut untuk mandiri menentukan apa yang ingin dia pelajari, ujian yang dia ikuti, serta apa yang dia lakukan dan dia inginkan. Terkadang perkuliahan dilakukan dalam ruang auditorium besar (sampai 600 siswa), sehingga kesiapan “mental” mahasiswa untuk belajar mandiri perlu benar-benar dipertimbangkan bila memilih kuliah di Universitas. Kuliah rata-rata dilakukan dalam bahasa Jerman. Walau demikian di beberapa Universitas (seperti di Universitas Bielefeld, Universitas Bremen, dan lain-lain) ada juga beberapa kuliah yang dilakukan dalam bahasa Inggris.

Model perkuliahan tersusun dari *Vorlesung* (perkuliahan), *Seminar* (semacam diskusi dalam ukuran kecil atau dalam kelompok kecil), dan *Übung* (latihan). Ujian dilakukan langsung dengan Profesor yang bersangkutan. Rata-rata ujian bersifat lisan, walau ada juga yang diberikan secara tulisan. Sistem ujiannya juga bervariasi ada yang diperbolehkan mengulang (untuk mata kuliah yang tidak lulus), namun sering juga hanya sekali saja (boleh mengulang namun tahun berikutnya, bukan semester berikutnya).

Sistem *Fachhochschule* (nama internasionalnya sekarang sering disebut sebagai *University of Applied Science*) lebih diatur secara ketat mirip dengan sistem perkuliahan di Indonesia, misal urutan perkuliahan, praktek, dan lain sebagainya. Berdasarkan dua lembaga pendidikan tinggi tersebut, mana yang lebih baik dan cocok, ini bergantung dengan tujuan sekolahnya. *Fachhochschule* rata-rata disukai oleh orang Jerman yang ingin langsung bekerja di industri, sedangkan Universitas lebih disukai bagi mereka yang ingin berkarir di bidang riset dan pengembangan, atau di bidang akademik. Berdasarkan pemantauan dan perkenalan dengan beberapa mahasiswa dari Indonesia, sebagian besar mahasiswa Indonesia lebih suka mengambil pendidikan *Fachhochschule* ini. Hal ini selain alasan waktu serta biaya juga karena mereka ingin cepat bekerja.

Hal seperti inilah yang sulit ditemukan di Indonesia. atau bahkan dapat dikatakan sulit diwujudkan di dunia pendidikan di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya potensinya sama dengan pendidikan di Jerman, sehingga pendidikan tinggi di Jerman, mempunyai suatu yang khas, hanya yang berbeda mekanisme pendidikan yang ditawarkan. Bagi yang suka “kebebasan” silahkan masuk ke Universitas, namun bagi yang suka “tuntunan” dipersilahkan masuk ke *Fachhochschule*, sehingga dapat segera bekerja dan mendapatkan gaji seperti yang diidam-idamkan. Beberapa *Fachhochschule* sekarang sudah menawarkan juga “*International Master*” yang menggunakan program berbahasa Inggris.

Manajemen Pendidikan

Konstitusi federal Jerman telah memberikan kewenangan pengaturan sistem pendidikan kepada negara bagian. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya otoritas penuh dari pemerintahan negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan. Pengaturan masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat negara bagian. Saat ini, negara bagian di Jerman memiliki sistem pendidikan yang berbeda, di antaranya perbedaan masa pendidikan. Kondisi ini kemudian mendorong pihak negara bagian untuk mengadakan satu standarisasi yang berlaku secara nasional, sehingga pada tahun 1969, sebagian wewenang negara bagian dalam masalah pendidikan dialihkan ke pemerintahan federal.⁹

Pendanaan pendidikan dibebankan kepada anggaran belanja negara bagian dan partisipasi masyarakat lokal. Pembagiannya meliputi pendanaan biaya personal yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan federal utamanya bertanggungjawab atas pendanaan perluasan institusi pendidikan tinggi, sarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan penelitian. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan tidak memungut biaya pendidikan. Sesungguhnya biaya kuliah di Jerman relatif rendah (hampir berarti tak perlu bayar SPP), baik untuk warga negara Jerman, ataupun mahasiswa asing. Biasanya mahasiswa hanya perlu membayar uang yang namanya “*Sozialgebühren*”.¹⁰ Ini untuk mendapatkan beberapa fasilitas bagi mahasiswa, misal agar bisa makan di MENSEA (kantin khusus mahasiswa yang ada di kampus-kampus di Jerman) dengan harga mahasiswa, di beberapa negara bagian, tiket kereta, bus dan trem tak perlu bayar. *Sozialgebühren* ini sekitar 100 Euro/semester. Sebagai gambaran di Universitas Bremen, kalau kita makan di MENSEA, sekali makan dengan tarif mahasiswa hanya membayar 1,3 Euro, tetapi bila kita sebagai pegawai Universitas atau orang luar yang ikut makan, dikenakan biaya 3,5 Euro.

⁹ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan...* hlm. 165-166

¹⁰ W.B Elley, *How in The World Do Student Read? IEA Study of Reading Literacy*, (The Hague: International Association for The Evaluation of Educational Achievement, 1992), hlm. 122

Kurikulum Pendidikan

Meteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen, yaitu: a). Tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan “grade” dan jenis sekolah; b). Pedoman kurikulum; c). Pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.¹¹

Secara umum kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut: a). Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah/sering dinyatakan pada *mukaddimah* suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum; b). Silabus, rekomendasi metode mengajar dan model rencana pelajaran diputuskan oleh kementerian negara; c). Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari kementerian negara bagian dan guru boleh menggunakannya sejauh terdapat dalam daftar rekomendasi buku yang sah; d). Metode mengajar, bukan “*teacher centered*” tetapi “*student centered*” yang sifatnya “*open instruction*” (murid belajar atas dorongan sendiri).

Evaluasi dan Penelitian Pendidikan

Dalam sistem pendidikan Jerman, tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan sebagaimana di Indonesia. Evaluasi dalam pengertian evaluasi program, sangat terbatas pada penelitian yang ditugaskan pada suatu komisi/panitia.

Dengan beberapa pengecualian, evaluasi (tes formal) pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah, akan tetapi hanya untuk keperluan diagnostik yang mengidentifikasi jenis-jenis *dyslexia* (kesulitan belajar akibat kondisi tertentu pada otak). Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui pencapaian murid, sepenuhnya diserahkan kepada guru selama proses belajar berlangsung. Hasilnya digambarkan dalam bentuk laporan kemajuan tertulis (terutama pendidikan dasar). Adapun tes tidak resmi diberikan dengan ketentuan frekuensi minimum. Bobot yang lebih besar terletak pada partisipasi murid dalam ruangan kelas, tugas rumah juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian.

Oleh karena prosedur penilaian bervariasi, maka nilai/skor murid sangat tergantung pada penilaian individu serta jenis tugas yang dinilai. Beberapa negara bagian di Jerman bahkan menetapkan kode-kode tersendiri yang bersifat sentral dan

¹¹ H. Mohle, *German Democratic Republic: System of Education*, In B. R. Clarke and Neave, (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1992), hlm. 82

standar guna memberikan umpan balik kepada guru agar penilaian yang diberikan benar-benar sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri.

Dalam hal sertifikat tamat belajar, itu menjadi tanggung jawab pejabat tingkat negara bagian, untuk menjamin tercapainya standar minimal. Prosedurnya bervariasi. Pada kebanyakan negara bagian, setelah menyelesaikan pendidikan di *Hauptschule* dan *Realschule* siswa menerima sertifikat yang diakui, sementara tugas yang disiapkan untuk ujian akhir di *Gymnasium* diserahkan dan disetujui oleh kementerian.

Perbedaan dan pengaruh Sistem Pendidikan Jerman dengan Sistem Pendidikan di Indonesia

Pendidikan selalu terkait erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang mampu memberikan implikasi besar bagi perubahan sebuah sistem pendidikan adalah ideologi. Ideologi sebagaimana diungkapkan oleh Lin-Huber (1998) merupakan salah satu hal yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam sebuah sistem budaya.¹² Ideologi ini tercermin dalam nilai yang dianut dan dipandang sebagai sebuah pedoman dalam bersikap dan berinteraksi satu sama lain.

Di samping ideologi banyak faktor lain yang turut mempengaruhi kebijakan pendidikan, misalnya tema kajian pendidikan di kawasan Asia yang mungkin lebih banyak mengarah kepada bidang manajemen sistem pendidikan dan kualitas pengajar. Sebagaimana dikemukakan oleh mantan presiden *Conference Comparative Education Society of Asia* (CESA) Fakry Gaffar pada saat pendeklarasian CESSIA di Universitas Negeri Jakarta bulan Februari 2009.¹³ Menunjukkan keterkaitan erat antara pendidikan dengan faktor-faktor yang meliputinya.

Landasan Filosofis dan Kebijakan Sistem Pendidikan

Filsafat yang dianut oleh satu komunitas akan mempengaruhi pendidikan dalam komunitas terkait. sehingga kurikulum pendidikan adalah cerminan filsafat yang dipercayai oleh masyarakatnya.¹⁴ Dengan demikian, penyusunan kurikulum akan senantiasa berkaitan dengan tiga bidang filsafat, yaitu *ontology* yang berkaitan dengan hakikat realita, *epistemology* yang membahas hakikat pengetahuan, dan *axiology*, bidang filsafat yang mengkaji permasalahan nilai.

¹² A. Margrith Lin-Huber, *Kulturspezifischer Spracherwerb*, (Bern: Verlag Hans Huber, 1998), hal. 56

¹³ Artikel "Indonesia's education equity goals 'moderate', UNESCO report shows". The Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008.

¹⁴ Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 15-16

Jerman pada masa Hitler mengusung Rasionalisasi fasis sebagai landasan sistem pendidikan Jerman saat itu. Pendidikan diarahkan kepada pembentukan sosok manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Dalam bidang keilmuan, pendidikan diarahkan pada penemuan-penemuan ilmiah, utamanya yang bermanfaat bagi pembangunan kekuatan militer Jerman, bidang olahraga bertujuan memunculkan atlet-atlet yang superior seperti juara tinju dunia Max Schmelling. Dalam bidang seni, pembuatan karya seni ditujukan untuk membentuk figur ras Arya yang unggul.

Setelah kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II dan bersatunya Jerman Barat dan Timur, Jerman mereformulasi ulang landasan falsafi yang dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Jerman kemudian memandang persatuan (*Einheit*), pembagian kekuasaan agar tidak tertumpuk pada satu orang (*die Macht verteilen*), dan kemampuan untuk membangun sebagai falsafah penting bagi bangsa Jerman yang tengah mengalami kehancuran. Dalam pandangan ini bisa kita lihat pengaruh filsafat *Eksistensialisme* yang menekankan kemampuan diri sendiri, filsafat *progresivisme* dengan proporsi sains dan perubahan yang terencana, juga pengaruh filsafat *critical pedagogy* dalam upaya memformulasi ulang kebenaran setelah kehancuran akibat ideologi nazi. Beragamnya landasan filsafat sangat mungkin terjadi di Jerman karena sistem negara yang menganut sistem federal. Dalam sistem ini, negara bagian mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem pendidikannya sendiri. Itulah sebabnya lama masa pendidikan di beberapa negara bagian berbeda dengan satu sama lain.

Pengaruh dari perubahan landasan filsafat pendidikan ini pada gilirannya berimbas pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan federal maupun pemerintahan negara bagian dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa kebijakan sistem pendidikan Jerman yang khas, yaitu: a). Pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan membebaskan biaya pendidikan dari *Kindergarten* sampai tingkat pendidikan tinggi; b). Pemerintah federal/pemerintah pusat tidak “memonopoli” kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara mutlak. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh pemerintahan negara bagian; c). Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berhasil cukup besar; d). Setelah *Wiedervereinigung* atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman bisa melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah dengan memberikan alokasi anggaran belanja negara yang lebih proporsional bagi pembangunan pendidikan di bekas Jerman Timur. Pemerataan kualitas

pendidikan di semua wilayah negeri merupakan kebijakan yang pada gilirannya akan menghilangkan potensi permasalahan di masa depan; e). Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Rasanya orang Jerman akan menjadi sangat prihatin atau bahkan mungkin tidak percaya bila dikatakan bahwa di Indonesia masih ada guru yang *nyambal* menjadi tukang ojek karena kelemahan finansial yang dimilikinya.¹⁵

Kajian Kontrastif dengan Indonesia.

Secara falsafi, landasan sistem pendidikan Jerman dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Hal ini terjadi karena pendidikan di manapun adalah hal yang dianggap baik. Pendidikan sejak dulu sampai saat ini di manapun dipandang sebagai sesuatu yang mulia.¹⁶ Di samping itu, kemiripan latar belakang mestinya juga bisa menimbulkan keinginan yang sama. Kekalahan Jerman dan penjajahan di Indonesia menimbulkan dampak yang sama yaitu adanya ketidaksenangan karena pihak lain mengatur “rumah tangga” sendiri dan keinginan untuk mandiri atau merdeka.

Namun dari beberapa persamaan landasan pendidikan Indonesia dan Jerman dalam praktek pelaksanaan pendidikan ada perbedaan misalnya masalah Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih merupakan pembicaraan yang melibatkan banyak perbedaan pemahaman. Persamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan di Indonesia belum terwujud dengan baik berbeda dengan Jerman. Sistem pendidikan tinggi (universitas) di Jerman mengakomodasi mereka yang menginginkan “kebebasan” untuk mengatur Studi mereka, hal ini mendorong kemandirian untuk memprogram belajar sesuai bidang yang diminati, sementara di Indonesia jarang ada yang demikian.

Indonesia harusnya bisa belajar dari Jerman yakni terkait dengan Pemerataan Pendidikan betapa pemerataan pendidikan begitu ditekankan di Jerman. Juga dalam masalah Guru, baik kualifikasi maupun kesejahteraannya yang masih jauh tertinggal dari Guru-guru di Jerman. Hal ini terjadi karena berbagai faktor yang ada, mulai dari lemahnya anggaran, pengawasan dan kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan.

¹⁵ Cecep Wahyu Hoerudin, dkk, *Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan Indonesia*, Universitas Pendidikan Bandung, 2009, hlm. 6-7

¹⁶ Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa...* hlm. 15

Namun seiring dengan jumlah alokasi anggaran pendidikan yang meningkat serta upaya memenuhi pemerataan akses kepada pendidikan melalui pembangunan desa tertinggal dan pembebasan biaya sekolah sampai tingkat menengah, dan sertifikasi guru serta dosen. Barangkali kita harapkan mampu menjadi *starting point* bagi pembentukan sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

Sistem Pendidikan di Australia

Sistem pendidikan Australia berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99 persen. Sekolah-sekolah mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar; lulusan universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan; serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat.¹⁷

Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400,000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap tahun. Kursus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri.¹⁸

Tujuan Pendidikan

Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk departemen pendidikan negara bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensimurid sebaik mungkin.¹⁹

Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan

¹⁷ L. Ingvarson and Chadbourne, (Eds.), *Valuing Teachers Work: New Direction In Teacher Appraisal*, (Melbourne: ACER, 194), hlm. 45

¹⁸ D' Cruz J and P. Langford (Eds.), *Issues in Australian Education*, (Melbourne: Longman Cheshire, 1990), hlm 89

¹⁹ <http://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-Pendidikan-Australia>, hlm. 4

teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan.

Pada dasarnya, pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan, dan memberikan arah pendidikan.

Struktur dan Jenis Pendidikan

Di Australia, sekolah dimulai dengan *kindergarten* (taman kanak-kanak) dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi lima strata (tingkatan), yaitu: a. Sekolah Dasar (*Primary School*); taman kanak-kanak sampai kelas 6 atau kelas 7. b. Sekolah Menengah (*Secondary or High School*); kelas 7 atau 8 sampai kelas 10. c. Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan (*Vocational Education and Training*) dan *senior high school/ senior secondary school/college* (sekolah menengah atas); kelas 11 sampai kelas 12.d. Pendidikan Tinggi (*University*).²⁰

Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Australia, siswa harus menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah terlebih dahulu, seperti halnya di Indonesia. Akan tetapi setelah menyelesaikan sekolah menengah, banyak pilihan bagi seorang siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

²⁰ Murid di Australia mulai sekolah pada umur 4,5 tahun sampai 5,5 tahun (*kindergarten*). Orang tua murid wajib menyekolahkan anaknya sampai dengan usia 15 atau 16 tahun (tergantung pada negara bagiannya). Jika anaknya tidak rajin masuk sekolah, orang tua dikenakan denda/sanksi. Pada tingkat *high school*, semakin tinggi tingkat sekolah, murid semakin bebas memilih mata pelajaran yang akan diambil. Pada tingkat *senior secondary school*, murid boleh memilih hampir semua mata pelajaran sesuai dengan keinginannya. Sebagian besar dari *high school* dan *senior secondary school* juga menawarkan mata pelajaran yang bersifat kejuruan, seperti perhotelan, turisme, muatan lokal; teknik kayu, teknik logam (*hospitality, tourism, woodworking, metal working*). Pada akhir kelas 12, murid sekolah mendapatkan *Year 12 certificate*. Piagam tersebut disertai transkrip nilai mata pelajaran yang telah diambil dengan nilai yang diraih. Untuk sebagian besar dari mata pelajaran pada tingkat kelas 12, nilai siswa dihitung dari tugas sekolah serta hasil ujian di negara bagian yang dilakukan pada akhir tahun. Nilai tersebut dapat langsung digunakan untuk mendaftar ke universitas, tanpa perlu diuji lagi. Di Australia, terdapat *public schools* (sekolah-sekolah negeri) dan *private schools* (sekolah-sekolah swasta). Kurang lebih dua pertiga dari murid bersekolah di sekolah negeri, sedangkan sisanya bersekolah di sekolah swasta. *Private schools* di Australia dibagi menjadi dua kelompok: yang berafiliasi pada agama (biasanya Katolik atau Protestan, tetapi ada juga sekolah Islam) dan yang tidak berafiliasi kepada agama (*independent schools*). Lihat: <http://www.atdiknas-canberra.org/sekolah-sd-sma/sistem-pendidikan-di-australia.html>; Education Attace; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, *Sistem Pendidikan Australia*, Rabu, 17 Maret 2011.

Manajemen Pendidikan

Otorita

Berdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Departemen pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru, dan hampir semua staf/karyawan, menyediakan gedung-gedung, peralatan serta perlengkapan lainnya, dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah.

Pada sektor pendidikan dasar dan TAFE, tugas departemen pendidikan berbeda-beda antara negara-negara bagian. Pada beberapa negara bagian, departemen pendidikan merupakan penyelenggara utama dan koordinator pendidikan dasar, sementara pada negara bagian lain tugas itu bukan menjadi tugas utama. Dalam penyelenggaraan TAFE, pola umumnya ialah ke arah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan dasar. Pada beberapa negara bagian, dibentuk badan koordinasi untuk memberikan saran kepada menteri pendidikan tentang prioritas-prioritas dalam sektor pendidikan.

Di samping bantuan dana umum yang diberikan kepada negara bagian, Commonwealth semenjak awal tahun 1970-an, telah pula menyediakan dana untuk tujuan-tujuan pendidikan khusus melalui Komisi Sekolah Commonwealth (*Commonwealth Schools Commission, disingkat CSC*) dan melalui Komisi Pendidikan Tinggi Commonwealth (*Commonwealth Tertiary Education Commission*), disingkat CTEC.²¹

Tanggung jawab politik ditingkat Commonwealth dijalankan oleh Menteri Pendidikan yang harus akuntabel kepada Parlemen Commonwealth. Menteri Pendidikan Commonwealth sering melakukan pertemuan dengan Menteri-menteri Pendidikan negara bagian melalui keanggotaan Dewan Pendidikan Australia atau *the Australian Education Council* (AEC). Dewan ini merupakan forum nasional yang akan membicarakan masalah-masalah prioritas dan kebijakan pendidikan.

Sekolah-sekolah yang statusnya bukan negeri merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Australia, dan sekolah-sekolah swasta ini menampung 24% dari seluruh siswa dalam tahun 1982, jumlah yang terus meningkat semenjak awal 1970-an. Hampir semua sekolah swasta berkaitan erat dengan dewan-dewan gereja, di antaranya, sekolah-sekolah Katolik Roma memiliki jumlah sekolah yang paling banyak, menampung hampir 80% siswa- siswa swasta.

²¹ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan...* hlm. 61

Selain dari keharusan untuk mengikuti standar pendidikan minimal yang telah ditentukan untuk keperluan registrasi, sekolah-sekolah swasta pada umumnya bebas dari pengawasan pemerintah.

Universitas dan institusi CAE adalah lembaga-lembaga otonomi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Pendanaan bagi lembaga ini sepenuhnya menjadi beban Commonwealth dan dikelola melalui CTEC (*Commonwealth Tertiary Education Council*). Akan tetapi setiap negara bagian membentuk badan koordinasi untuk merencanakan dan mengkaji pendidikan tinggi mengonsultasikannya dengan CTEC.

Kurikulum dan Metodologi Pengajaran

Suatu kecenderungan pada semua sistem sekolah negeri semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah. Tetapi kecepatannya sangat bervariasi. Pada beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada negara bagian yang lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir; detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada kedua territories, *the Australian Capital Territory* (ACT) dan *the Northern Territory*, sekolah relatif memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang ditentukan di tingkat sekolah.

Di pusat, penyusunan pedoman kurikulum serta objektif kurikulum secara umum biasa menjadi tanggung jawab seksi kurikulum dalam departemen pendidikan. Pedoman kurikulum pada dasarnya disusun oleh komisi-komisi kurikulum yang sudah ada untuk setiap bidang. Walaupun sekolah-sekolah swasta memiliki otonomi yang cukup luas dalam hal kurikulum, dalam banyak hal mereka mengikuti kurikulum yang sama yang dipakai di sekolah-sekolah negeri dalam negara bagian atau teritorinya.

Pusat Pengembangan Kurikulum (*Curriculum Development Centre, / CDC*) dibentuk oleh pemerintah Commonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya, serta menyiapkan materi kurikulum. Buku-buku pelajaran dan ujian disiapkan oleh berbagai badan termasuk seksi kurikulum, departemen pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC), penerbit buku-buku akademik yang komersial, dan asosiasi guru-guru bidang studi.

Curriculum Framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya Abad XXI, dengan semboyan “*Educating our Children to succeed in the 21th Century*”. Prof. Lesley Parker, Chair of the Curriculum Council, menyatakan rasa bangganya, karena “*The Curriculum Framework was developed through a unique cosultative process that involved almost 10.000 teachers, parents, academics, curriculum officers, students and other members of the community*”. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum di Australia telah melibatkan semua stakeholder pendidikan.

Ada beberapa hal yang menarik dalam *Curriculum Framework*:

Pertama, ada 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu (1) cultural diversity, (2) changes in the family structure, (3) rapid pace of technological change, (4) global environmental issues, (5) changing nature of social conditions, (6) change in the workplace, (7) inter-dependence in the global economy, (8) uncertain standards of living.

Kedua, ada lima karakteristik nilai (*values*) yang akan dibangun melalui kurikulum tersebut, yaitu: (1) *pursuit of knowledge and commitment to achievement of potential*, (2) *self acceptance and respect of self*, (3) *respect and concern for others and their rights*, (4) *social and civic responsibility*, dan (5) *environmental responsibility*.²²

Curriculum Framework tidak menggunakan istilah “*student outcomes statement*” atau dikenal dengan “*overarching statement learning outcomes*”, yang rumusannya pada hakikatnya sama dengan rumusan kompetensi. Ada 13 (tiga belas) *student outcomes statement* yang akan dicapai melalui delapan mata pelajaran secara sinergis dengan menggunakan konsep “*links across the curriculum*”, yaitu: 1. *Students use language to understand, develop and communicate ideas and information and to interact with others*; 2. *Students select, integrate and apply numerical and spatial concepts and techniques*; 3. *Students recognize when and what information is needed, locate and obtain it form a range of sources and evaluate, use and share it with others*; 4. *Students select, use and adapt technologies*; 5. *Students describe and reason about patterns, structures and relationship in order to understand, interpret, justify and make patterns*; 6. *Student visualize consequences, think laterally, recognize opportunity and potential and are prepared to test options*; 7. *Students understand and appreciate the physical, biological and technological world and have the knowledge and skills and values to make decision in relation to it*; 8. *Students understand their cultural, geographic and historical context and have the knowledge, skills and values necessary for active participation in life in Australia*; 9. *Students interact with other people and cultures other than their own and are equipped to contribute to the global community*; 10. *Student participate in creative activity of their own and understand*

²² Autralian Bureu of Statistic, *Schools, Australia 1993*, (Camberra: ABS, 1993), hal. 8

*and engage with the artistic, cultural and intellectual work of others; 11. Students value and implement practices that promote personal growth and well being; 12. Students are self-motivated and confident in their approach to learning and are able to work individually and collaboratively; 13. Students recognize that everyone has the right to feel valued and be safe, and, in this regard, understand their rights and obligations and behave responsibly.*²³

Konsep Evaluasi

Selama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah Perang Dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah.

Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12.

Untuk masuk ke universitas dan CAE pada umumnya diperlukan kualitas performansi tertentu pada tahun pendidikan ke-12, walaupun kebanyakan institusi memberikan kriteria tersendiri bagi orang-orang dewasa yang kebetulan tidak memenuhi persyaratan formal. Masuk ke TAFE dimungkinkan setelah menamatkan pendidikan 10 tahun dengan hasil yang memuaskan. Masalah yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar- mengajar yang mungkin muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan usia.

Perbedaan dan pengaruh Sistem Pendidikan Australia dengan Sistem Pendidikan di Indonesia

Baik Indonesia maupun Australia sama-sama menerapkan Wajib belajar di Australia wajib belajar diterapkan selama 10 tahun, sedangkan Indonesia mencanangkan wajib belajar 9 tahun, yang akan ditingkatkan menjadi 12 tahun. Kebijakan kedua negara tentang wajib belajar relatif sama.

²³ D' Cruz J and P. Langford (Eds.), *Issues in Australian...*, hlm. 88

Di Australia lama pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbeda-beda pada setiap negara bagian dan wilayah daratan, dikarenakan diberikannya kewenangan seluas-luasnya (otorita penuh) dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan di Indonesia, lama pendidikan dasar dan pendidikan menengah relatif sama untuk setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota).

Singgungan pendidikan Australia dan Indonesia banyak terjadi melalui banyaknya pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Mengingat hubungan Indonesia dengan Australia sangat dekat dan dari segi letak geografisnya pun Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat.

Pengaruh Konsep Pendidikan Jerman dan Australia terhadap Pendidikan di Indonesia

Dalam tataran konsep Pendidikan, baik Indonesia, Jerman maupun Australia memiliki konsep yang hampir sama. Misalkan dari Penjenjangan pendidikan sama-sama dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan Tinggi. Bahkan Indonesia dan Australia menerapkan wajib Belajar, Australia 10 Tahun sedangkan Indonesia 9 Tahun dan akan ditingkatkan menjadi 12 Tahun.

Sedangkan otoritas pendidikan di Indonesia tampaknya lebih sentralistik meskipun tidak mengabaikan peranan daerah dalam mengelola pendidikan, namun Kebijakan Pemerintah melalui Menteri Pendidikan lebih Dominan dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia, hal ini hampir mirip dengan Jerman yang kebijakan Pendidikan ada pada Menteri Pendidikan yang berkoordinasi dengan menteri Negara Bagian, Termasuk Juga dalam Pendanaan Pendidikan ditanggung Pemerintah Pusat serta didukung Pemerintah daerah di Indonesia sementara di Jerman Pemerintah Pusat dalam Pendanaan pendidikan dibantu Masyarakat. Sedangkan di Australia kebijakan Pendidikan dan pendanaan ada pada Masing-Masing Menteri negara Bagian. Otoritas ini juga berimplikasi pada penyusunan kurikulum pendidikan. Indonesia yang kebijakan pendidikan cenderung sentralistik, maka kurikulum pendidikan juga dirancang dari pusat, sedangkan di Jerman dan Australia lebih memberi Peluang pada Negara bagian maupun sekolah untuk turut merancang Kurikulum dengan tidak menafikan peran pemerintah. Sementara dari sisi evaluasi sepertinya Indonesia lebih baik dengan adanya sistem evaluasi yang terencana dan teratur, sedangkan Australia lebih menekankan pada penilaian eksternal yang ekstensif, meskipun ada juga ujian nasional yang dilaksanakan.

Berdasar perbandingan ketiga negara di atas masing-masing memiliki konsep dan sistem pendidikan masing-masing yang dalam banyak hal ada kemiripan. Namun yang perlu kita cermati adalah mengapa kualitas pendidikan di Indonesia Masih tertinggal dibandingkan Australia dan Jerman. Maka dari perbandingan pendidikan ini kita bisa petakan kelemahan dan keunggulan pendidikan dari masing-masing negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sebenarnya secara undang-undang Indonesia sudah sama dengan kedua negara, Australia dan Jerman menyediakan layanan pendidikan dan pendidikan Gratis sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dan 4, namun yang menjadi persoalan adalah dalam realisasinya.

Poin penting yang bisa kita ambil dari Pendidikan di Jerman adalah pemerataan pendidikan yang dilaksanakan dengan baik, kebijakan pemerintah terkait pemerataan pendidikan ini berimbas pada terjangkaunya akses pendidikan yang relatif sama di semua wilayah dari semua warga negara, termasuk juga dalam pengalokasian anggaran pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah atau negara bagian. Bandingkan dengan Indonesia yang masih banyak terjadi kesenjangan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terpencil, belum lagi alokasi anggaran pendidikan yang kurang tepat sasaran, sehingga pendidikan gratis belum sepenuhnya terwujud. Karena tidak sedikit warga negara Indonesia yang merasakan beban biaya Pendidikan menjadi beban yang sangat berat sehingga tak jarang berakhir dengan keputusan tidak melanjutkan sekolah. Hal ini tentunya semakin menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia.

Disamping itu apresiasi pemerintah terhadap prestasi pendidikan dirasa sangat kurang, sehingga tidak sedikit putra bangsa yang berprestasi justru enggan untuk pulang dan berkarya di Indonesia karena minimnya Apresiasi, dampaknya adalah motivasi belajar pelajar Indonesia menjadi tereduksi.

Lemahnya kualitas pendidikan Indonesia, dan minimnya apresiasi prestasi ini tampak dari besarnya minat pelajar-pelajar Indonesia untuk belajar ke Australia dan Jerman, hal ini setidaknya dipengaruhi beberapa fakta antara lain: 1. Jerman dan Australia adalah salah satu negara paling maju di Dunia, bahkan Jerman menduduki peringkat ke-3 setelah Amerika dan Jepang dalam bidang ekonomi; 2. Kualitas Pendidikan dan penelitian sangat baik, dan 3. Biaya pendidikan murah. Pemerintah dan masyarakat di Australia menganut sistem sosial demokrat yang menjamin semua warganya mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Tiga hal ini menunjukkan kualitas pendidikan di kedua negara tersebut, setidaknya

sistem pendidikan di Jerman dan Australia sangat mendukung untuk pengembangan keilmuan dan penelitian. Tingkat akses pendidikan di kedua negara tersebut juga sangat terjangkau. Disamping apresiasi yang tinggi atas prestasi pendidikan.

Berdasarkan dari beberapa pandangan di atas, kita menyadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini memang berada di peringkat yang kurang membanggakan. Namun kondisi ini bukan merupakan alasan untuk terus merasa terpuruk, karena sistem pendidikan Indonesia juga telah menghasilkan juara-juara olimpiade di bidang Matematika, Fisika dan Biologi. Artinya, Indonesia masih mempunyai potensi yang apabila dikelola dengan baik akan berubah menjadi kekuatan yang mampu mengimbangi negara-negara maju seperti Jerman dan Australia tersebut.

Salah satu upaya yang bisa dijadikan *starting point* bagi upaya perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan Indonesia adalah dengan memenuhi menganalisa kelemahan dan kelebihan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kaji banding (*Study Comparative*) dengan sistem negara lain yang lebih baik, seperti halnya Jerman dan Australia misalnya, sehingga bisa menjadi gambaran bagi kita, bagaimana kita bisa memperkuat dan meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan Indonesia, kelak Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berada di barisan terdepan dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik.

Dan yang tak kalah penting adalah peran pemerintah sebagai pembuat keputusan pendidikan di Indonesia, yakni kesungguhan niat pemerintah untuk membenahi pendidikan Indonesia, artinya apa yang telah diamanatkan Undang-Undang hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, baik dalam pembiayaan dan akses pendidikan yang merata.

Simpulan

Studi perbandingan pendidikan merupakan studi yang sangat penting demi mewujudkan generasi bangsa yang lebih berkualitas sehingga dapat memajukan Negara Indonesia kelak. Kemiskinan dan kebodohan adalah faktor utama ketertinggalan negara Indonesia, artinya dengan melihat pola/ Sistem pendidikan di Jerman dan Australia, kiranya dapat termotivasi dan dapat mengevaluasi dari sejumlah kekurangan sehingga kedepan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih baik, karena selain SDA yang melimpah, Indonesia juga harus mempersiapkan SDM yang handal dan berkualitas.

Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia mutlak ditingkatkan bila Indonesia tidak ingin semakin jauh tertinggal dari Jerman dan Australia, Jaminan akses Pendidikan yang menjadi Hak setiap warga negara sebagaimana amanat Undang-undang harus dipenuhi. Begitu juga alokasi anggaran pendidikan harus direalisasikan dan tepat sasaran. Hal ini mengingat ketertinggalan Indonesia dari negara lain khususnya Jerman dan Australia adalah dalam tataran Aktualisasi dan implementasi konsep pendidikan Nasional dalam praktek Pendidikan di lapangan yang belum berjalan secara maksimal.

Rujukan

- Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Lubuk Agung, 2001
- Artikel “Indonesia’s education equity goals ‘moderate’, UNESCO report shows”. The Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008
- A. Margrith Lin-Huber, *Kulturspezifischer Spracherwerb*, Bern: Verlag Hans Huber, 1998
- Autralian Bureu of Statistic, *Shools; Australia 1993*, Camberra: ABS, 1993
- Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2008
- Cecep Wahyu Hoerudin, dkk, *Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan Indonesia*, Universitas Pendidikan Bandung, 2009
- Don Adams, *Educational Pattern In Contemporary Societies*, In. Thut (Eds.), *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- D’ Cruz J and P. Langford (Eds.), *Issues in Australian Education*, (Melbourne: Longman Cheshire, 1990
- Frackman, dkk, *Higher Education policy in Germany: In Goedegebuure, Leo et al (Eds), Higher Education Policy: An International Comparative Perspective*, Paris: Pergamon Press, 1993
- H. Mohle, *German Democratic Republic: System of Education*, In B. R. Clarke and Neave, (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1, Oxford: Pergamon Press, 1992
- <http://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-Pendidikan-Australia>
- <http://www.atdiknas-canberra.org/sekolah-sd-sma/sistem-pendidikan-di-australia.html>; Education Attace; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, Sistem Pendidikan Australia, Rabu, 17 Maret 2011.
- John Francis Cramer dan George Stephenson Browne, *Contemporary Education*, New York: Harcourt Brace, 1956
- J. T. Fey, *System of Education of Federal Republic of Germany*. In F. Husen and Postlethwaite (Eds), *International Encyclopedia of Education*. New York: Pergamon Press, 1985

- L. Ingvarson and Chadbourne, (Eds.), *Valuing Teachers Work: New Direction In Teacher Appraisal*, Melbourne: ACER, 194
- Robert F. Lawson, *Reconstruction Education: East German School and Universities after Unification* by Rosalin M. O Princhard, (Book Review), In *Comparative Education Review*, Vol. 44 No. 1, Februari, 2000
- U. Teichler and B. Kehm, *System of Higher Education of Federal Republic of Germany*. In Clarke, B. R., and Neave, G. (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1992
- W.B Elley, *How in The World Do Student Read? IEA Study of Reading Literacy*, The Hague: International Association for The Evaluation of Educational Achicvenment, 1992